



Banua Journal Of Civic Education (BJCE)

Vol. 1 No. 1, 2026

E-ISSN: XXXX -XXXX



Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Partisipasi Publik pada Tingkat Pasif, Aktif, dan Kritis di Kalangan Mahasiswa

Anisha Shahara¹, Desi², Maya Ramadhani³, Merry Andini⁴, Mohammad Ridwan⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat

E-Mail: anishashahara03@gmail.com

Received
18/05/2026

Accepted
10/06/2026

Published
30/06/2026

DOI

00.XXXXX/bjce.v1i1.308

ABSTRACT

This study examines the role of Civic Education in shaping university students' public participation across three levels: passive, active, and critical participation. In a democratic system, public participation is essential to support accountable and responsive governance, while university students occupy a strategic position as educated citizens and agents of social change. This study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of scholarly articles, reports, and other relevant written sources on Civic Education and student participation. The literature was analyzed by identifying, reducing, grouping, and interpreting findings according to the three levels of participation. The synthesis indicates that Civic Education provides an important foundation for students' civic knowledge, skills, and dispositions. Passive participation is reflected in awareness of rights, responsibilities, rules, and democratic values; active participation develops through discussion, student organizations, social activities, and campus democracy; and critical participation is expressed through the ability to evaluate public issues, communicate arguments, and use digital spaces responsibly. These levels should be understood as a continuum rather than rigid categories. Contextual, interactive, and reflective Civic Education can therefore strengthen meaningful student participation in democratic life.

Keywords: Civic Education, Public Participation, University Students

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk partisipasi publik mahasiswa pada tiga tingkat, yaitu partisipasi pasif, aktif, dan kritis. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik diperlukan untuk menopang pemerintahan yang akuntabel dan responsif, sedangkan mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai warga negara terdidik sekaligus agen perubahan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, laporan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan partisipasi mahasiswa. Literatur dianalisis melalui proses identifikasi, reduksi, pengelompokan, dan interpretasi temuan berdasarkan tiga tingkat partisipasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan landasan penting bagi

How to cite:

Shahara, A., Desi, Ramadhani, M., Andini, M., & Ridwan, M. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Partisipasi Publik pada Tingkat Pasif, Aktif, dan Kritis di Kalangan Mahasiswa. *Banua Journal Of Civic Education (BJCE)*, 1(1), 21-26.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

© 2026, BJCE: Banua Journal Of Civic Education

pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewarganegaraan mahasiswa. Partisipasi pasif tercermin pada kesadaran terhadap hak, kewajiban, aturan, dan nilai demokrasi; partisipasi aktif berkembang melalui diskusi, organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, serta praktik demokrasi kampus; sedangkan partisipasi kritis tampak pada kemampuan menilai isu publik, menyampaikan argumen, serta memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab. Ketiga tingkat tersebut lebih tepat dipahami sebagai suatu kontinum, bukan kategori yang sepenuhnya terpisah. Karena itu, pembelajaran PKn yang kontekstual, interaktif, dan reflektif penting untuk mendorong partisipasi mahasiswa yang lebih bermakna dalam kehidupan demokrasi.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Publik, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses memilih pemimpin, tetapi juga menempatkan warga negara sebagai pihak yang memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan dan kewajiban untuk terlibat dalam kehidupan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga pemerintahan tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga (Gulo & Mendrofa, 2025). Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa memiliki posisi strategis karena kapasitas intelektual, akses terhadap informasi, dan keterlibatannya dalam berbagai ruang sosial memungkinkan mereka menjalankan peran sebagai agen perubahan. Pendidikan Kewarganegaraan turut membentuk orientasi tersebut dengan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran, hak, tanggung jawab, serta fungsi sosialnya sebagai warga negara (Jannah & Sulianti, 2021).

1. Partisipasi pasif merupakan tahap ketika mahasiswa telah memiliki kesadaran terhadap aturan, hak, kewajiban, dan isu publik, tetapi belum banyak terlibat dalam tindakan sosial atau politik secara langsung. Bentuk ini dapat berupa kepatuhan terhadap norma, pengamatan terhadap proses publik, serta refleksi atas persoalan kewarganegaraan.
2. Partisipasi aktif tampak ketika mahasiswa terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi, diskusi, pemilihan di lingkungan kampus, kegiatan sosial, atau bentuk keterlibatan publik lainnya. Pada tahap ini, partisipasi tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi telah diwujudkan melalui tindakan dan interaksi dengan lingkungan sosial.
3. Partisipasi kritis menunjukkan kualitas keterlibatan yang lebih reflektif. Mahasiswa tidak hanya hadir atau mengikuti kegiatan, tetapi mampu menganalisis kebijakan dan isu publik, menguji informasi, menyampaikan kritik dan alternatif solusi, serta mempertanggungjawabkan pendapatnya dengan alasan yang logis.

Pembedaan tersebut penting karena keterlibatan mahasiswa tidak selalu menunjukkan kualitas partisipasi yang sama. Kemelekan terhadap kehidupan kampus dapat mendorong partisipasi, tetapi keterlibatan yang bermakna memerlukan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan menilai persoalan secara kritis (Kartikasari, 2017). Apabila mahasiswa hanya berada pada posisi penonton atau mengikuti kegiatan tanpa pemahaman yang memadai, fungsi kontrol sosial yang seharusnya melekat pada kelompok terdidik menjadi kurang optimal. Karena itu, kajian mengenai partisipasi mahasiswa perlu memperhatikan bukan hanya ada atau tidaknya keterlibatan, tetapi juga kedalaman kualitas partisipasi tersebut.

Firmansyah (2020) mengkaji partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA IKIP PGRI Pontianak dan menemukan keterlibatan mahasiswa melalui pemberian suara, kampanye, kepanitiaan, serta diskusi kandidat. Kajian tersebut penting untuk menggambarkan praktik demokrasi kampus, tetapi fokusnya lebih banyak berada pada bentuk dan pelaksanaan partisipasi dalam pemilihan. Keterkaitan antara praktik tersebut dengan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewarganegaraan belum menjadi pusat analisis.

Selain itu, pembagian partisipasi ke dalam kategori aktif dan pasif belum sepenuhnya menangkap perkembangan partisipasi mahasiswa di ruang publik kontemporer. Partisipasi kini tidak hanya berlangsung melalui pemilihan atau organisasi formal, tetapi juga melalui advokasi

isu, diskusi publik, produksi dan penyebaran informasi, serta keterlibatan di ruang digital. Perubahan tersebut menuntut kemampuan literasi, penalaran, dan evaluasi informasi agar keterlibatan mahasiswa tidak berhenti pada ekspresi, melainkan berkembang menjadi partisipasi yang bertanggung jawab dan kritis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan partisipasi pasif, aktif, dan kritis sebagai tiga tingkat analitis untuk membaca kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi publik mahasiswa. Kebaruan kajian terletak pada upaya menghubungkan ketiga tingkat itu dalam satu kerangka yang berkesinambungan. Dengan demikian, partisipasi tidak dipahami sebagai kategori yang berdiri sendiri, tetapi sebagai proses yang dapat berkembang dari kesadaran dasar menuju keterlibatan langsung dan kemudian menuju kemampuan reflektif dalam menilai persoalan publik.

Kerangka tersebut sejalan dengan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya menekankan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga keterampilan dan disposisi yang diperlukan untuk bertindak sebagai warga negara. Kajian mengenai *civic skills* menunjukkan bahwa pembelajaran PKn dapat memperkuat kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan mengambil keputusan, sedangkan pengalaman kewarganegaraan memberi ruang untuk menerapkan kemampuan tersebut dalam situasi nyata (Febrianti et al., 2023; Prasetyo, 2018).

Atas dasar itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk partisipasi publik mahasiswa pada tingkat pasif, aktif, dan kritis? Pertanyaan tersebut diarahkan untuk memahami hubungan antara pembelajaran kewarganegaraan dengan perkembangan kesadaran, keterlibatan, dan kemampuan kritis mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk ketiga tingkat partisipasi tersebut serta menjelaskan kondisi pembelajaran yang dapat mendorong peralihan dari pemahaman kewarganegaraan menuju keterlibatan yang lebih aktif dan kritis. Hasil kajian diharapkan memberi gambaran konseptual mengenai cara pembelajaran PKn dapat dikembangkan agar lebih kontekstual, dialogis, dan relevan dengan dinamika partisipasi mahasiswa, termasuk di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu menelaah dan menyintesis gagasan serta temuan penelitian terdahulu mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan partisipasi publik mahasiswa. Data penelitian berupa teks yang diperoleh dari artikel ilmiah, laporan, dan sumber tertulis yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pola, dan hubungan antarkonsep yang muncul dalam literatur, bukan untuk mengukur pengaruh antarvariabel secara statistik (Safarudin et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan, *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*, partisipasi mahasiswa, demokrasi kampus, serta keterlibatan mahasiswa di ruang sosial dan digital. Literatur yang dipilih kemudian dibaca secara menyeluruh, direduksi berdasarkan relevansinya, dan dikelompokkan ke dalam tiga tema analitis: partisipasi pasif, aktif, dan kritis. Tahap analisis dilanjutkan melalui perbandingan dan interpretasi antarsumber untuk menemukan pola mengenai kontribusi pembelajaran PKn pada setiap tingkat partisipasi. Dengan desain tersebut, mahasiswa diposisikan sebagai fokus kajian yang direpresentasikan dalam literatur, bukan sebagai responden atau informan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi pasif dapat dipahami sebagai fondasi awal keterlibatan kewarganegaraan. Pada tahap ini, kontribusi PKn terutama terlihat pada pembentukan pengetahuan dan kesadaran mengenai hak, kewajiban, aturan, nilai Pancasila, serta prinsip demokrasi. Mahasiswa mungkin

belum terlibat secara langsung dalam organisasi atau tindakan politik, tetapi telah memiliki kerangka untuk memahami posisinya sebagai warga negara. Dalam perspektif *experiential civic learning*, pengetahuan kelas, refleksi, dan pengalaman kewarganegaraan saling berhubungan dalam membangun kesiapan untuk terlibat secara lebih bertanggung jawab (Allen et al., 2025). Karena itu, partisipasi pasif tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai ketidakaktifan, melainkan sebagai tahap pembentukan orientasi dan kesiapan kewarganegaraan.

Pada tingkat ini, kepatuhan terhadap norma dan aturan juga dapat dibaca sebagai bentuk kesadaran kewarganegaraan. Mahasiswa yang memahami alasan di balik tata tertib, disiplin, dan penghormatan terhadap hak orang lain tidak sekadar menaati aturan karena kewajiban formal, tetapi mulai menginternalisasi fungsi norma dalam kehidupan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan berperan ketika pembelajaran mampu menghubungkan aturan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, serta kepentingan publik. Fondasi tersebut menjadi penting karena keterlibatan yang lebih aktif membutuhkan pemahaman mengenai batas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial.

Partisipasi aktif berkembang ketika pengetahuan dan kesadaran tersebut diwujudkan melalui tindakan. Diskusi kelas, kegiatan sosial, organisasi kemahasiswaan, dan forum demokrasi kampus menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk berlatih berkomunikasi, mendengarkan sudut pandang berbeda, bekerja sama, serta mengambil keputusan. Parker-Shandal (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam diskusi kelas berkaitan dengan kemampuan mengambil perspektif dan keterlibatan mahasiswa. Dalam konteks PKn, praktik semacam ini memperluas fungsi pembelajaran dari transfer materi menjadi latihan partisipasi yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan *civic skills* secara konkret.

Pengalaman organisasi juga memperkuat dimensi tersebut. Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa keterampilan dan empati merupakan bagian dari *civic competencies* yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan moralitas publik. Sementara itu, Hidayah dan Sunarso (2018) memperlihatkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat berfungsi sebagai mitra kampus, fasilitator, serta ruang pengabdian yang mengembangkan *civic skills* aktivisnya. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa partisipasi aktif tidak lahir hanya dari pengetahuan tentang demokrasi, tetapi membutuhkan kesempatan untuk mempraktikkan kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab dalam situasi nyata.

Praktik demokrasi kampus, termasuk pemilihan organisasi mahasiswa, merupakan contoh lain dari partisipasi aktif. Firmansyah (2020) mencatat keterlibatan mahasiswa dalam pemungutan suara, kampanye, kepanitiaan, dan diskusi kandidat, sedangkan Manessu et al. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilihan BEM berlangsung dalam bentuk yang beragam dan dipengaruhi oleh kesadaran politik, pengalaman organisasi, serta lingkungan sosial. Dari sudut pandang PKn, kegiatan tersebut menjadi bermakna apabila mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi memahami proses, menilai pilihan, dan menyadari konsekuensi keputusan yang dibuat.

Partisipasi kritis menuntut kemampuan yang lebih jauh daripada keterlibatan formal. Mahasiswa perlu mampu membedakan fakta dan opini, memeriksa informasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, serta menyampaikan kritik berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran PKn dapat melatih kemampuan ini melalui debat, diskusi berbasis isu, analisis kasus, dan refleksi atas persoalan publik. Dalam lingkungan digital, kemampuan tersebut semakin penting karena mahasiswa berhadapan dengan arus informasi yang cepat sekaligus ruang ekspresi yang luas.

Ruang digital juga memperluas bentuk partisipasi mahasiswa. Studi Elfandari et al. (2023) memperlihatkan bahwa pembelajaran yang memberi ruang praktik komunikasi politik melalui media sosial dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam memahami dinamika partisipasi. Dalam kerangka partisipasi kritis, penggunaan media sosial tidak cukup dinilai dari seberapa sering mahasiswa menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuannya memeriksa informasi, menyusun argumen, menghormati perbedaan, dan mempertimbangkan dampak komunikasi. Dengan demikian, literasi digital dan etika komunikasi menjadi bagian penting dari kualitas partisipasi publik mahasiswa.

Ketiga tingkat partisipasi tersebut pada dasarnya saling berkaitan. Pengetahuan dan kesadaran yang berkembang pada tahap pasif menyediakan dasar bagi keterlibatan aktif, sedangkan pengalaman berorganisasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan dapat memperkuat kemampuan reflektif yang dibutuhkan dalam partisipasi kritis. Proses ini tidak selalu berlangsung secara linear karena seorang mahasiswa dapat aktif dalam satu konteks tetapi pasif atau kurang kritis dalam konteks yang lain. Oleh sebab itu, PKn lebih tepat dipahami sebagai ruang pembelajaran yang mempertemukan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* secara simultan.

Sintesis ini konsisten dengan penelitian Febrianti et al. (2023) yang menempatkan penguatan *civic skills* melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai unsur penting dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa. Indikator keterlibatan tidak hanya berkaitan dengan interaksi dan keikutsertaan dalam isu publik, tetapi juga kemampuan memantau peristiwa, mempertimbangkan kebijakan, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupan sosial. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kualitas partisipasi mahasiswa perlu dibaca secara lebih luas daripada sekadar kehadiran dalam kegiatan formal.

Meskipun demikian, literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa tidak seragam. Perbedaan metode pembelajaran, iklim akademik, pengalaman organisasi, kepercayaan diri, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat dapat memengaruhi kualitas keterlibatan. Karena penelitian ini berbasis studi literatur, kesimpulan yang dihasilkan bersifat sintesis konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh mahasiswa pada satu universitas tertentu. Implikasinya, pembelajaran PKn perlu memberi lebih banyak ruang pada diskusi terbuka, pembelajaran berbasis proyek atau masalah, analisis isu aktual, serta pengalaman kewarganegaraan yang memungkinkan mahasiswa bergerak dari memahami menuju melakukan dan menilai secara kritis.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas partisipasi publik mahasiswa. Peran tersebut tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan tentang negara, hukum, dan demokrasi, tetapi juga mencakup pembentukan keterampilan serta disposisi yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam kerangka penelitian ini, partisipasi mahasiswa dapat dipahami melalui tiga tingkat yang saling berhubungan, yaitu pasif, aktif, dan kritis.

Pada tingkat pasif, PKn membangun kesadaran terhadap hak, kewajiban, aturan, dan nilai demokrasi sebagai fondasi kewarganegaraan. Pada tingkat aktif, pengetahuan tersebut berkembang menjadi keterlibatan melalui diskusi, organisasi, kegiatan sosial, dan praktik demokrasi kampus. Pada tingkat kritis, mahasiswa diharapkan mampu menilai isu dan kebijakan, menguji informasi, menyampaikan argumen, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Ketiga tingkat ini tidak bersifat kaku, melainkan menggambarkan kontinum perkembangan kualitas partisipasi yang dapat berbeda menurut konteks dan pengalaman mahasiswa.

Karena penelitian ini menggunakan studi literatur, temuan yang dihasilkan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi empiris mahasiswa pada populasi tertentu. Penelitian berikutnya perlu menguji kerangka pasif-aktif-kritis melalui data lapangan dan membandingkan pengaruh berbagai pendekatan pembelajaran PKn. Secara praktis, pembelajaran PKn perlu dikembangkan secara lebih kontekstual, dialogis, dan berbasis pengalaman agar mahasiswa tidak hanya memahami perannya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki keberanian, keterampilan, dan pertimbangan kritis untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokrasi.

REFERENSI

Allen, D., Blauw, M., Burton, R., Dunn, J., Green, V., Heinesen, A., Humphries, R., Jagroo, M., Kunzman, H., Rose, J., & Clay Roy, E. (2025). *Experiential civic learning for American*

- democracy: A portrait of the field. Council on Civic Strength Task Force on Experiential Civic Learning.
- Elfandari, S., Ilham, M. H., & Lionardo, A. (2023). Menakar partisipasi politik mahasiswa berbasis pembelajaran (studi eksperimen pada mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya). *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 70–88. <https://doi.org/10.33376/ik.v8i1.2055>
- Febrianti, N., Nur, S. M., & Juwita, S. R. (2023). Penguatan civic skills melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa sebagai warga negara. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 14–21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v11i1.13857>
- Firmansyah, S. (2020). Analisis partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden BEM REMA IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 192–199. <https://doi.org/10.31571/pkn.v4i2.2122>
- Gulo, L. P. I., & Mendrofa, E. A. Y. (2025). Hak untuk bersuara, kewajiban untuk berpartisipasi: Makna demokrasi sesungguhnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 120–126. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.641>
- Hidayah, Y., & Sunarso, S. (2018). Penguasaan civic skills aktivis badan eksekutif mahasiswa (studi di Universitas Negeri Yogyakarta). *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 153–164. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.9862>
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif mahasiswa sebagai agent of change melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.3193>
- Kartikasari, F. (2017). Kemelekan dan partisipasi mahasiswa terhadap aktivitas kampus Universitas Airlangga. *Libri-Net*, 6(3), 45–46.
- Manessu, C. H., Damis, M., & Mawar, J. E. T. (2025). Partisipasi mahasiswa dalam proses demokrasi kampus: Studi kasus pemilihan BEM FISIP UNSRAT tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(4), 7412–7428.
- Parker-Shandal, C. (2023). Participation in higher education classroom discussions: How students' identities influence perspective taking and engagement. *Teaching and Learning Inquiry*, 11, Article 19. <https://doi.org/10.20343/teachlearningqu.11.19>
- Prasetyo, W. H. (2018). Peningkatan civic skills dan civic empathy mahasiswa melalui citizen journalism project. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 220–230. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i2.21792>
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan demokrasi yang inklusif melalui pemberdayaan warga negara menuju masyarakat yang demokratis. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)*, 7, 1216–1227.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.